



FORUM PEMBANGUNAN TIONGGOK 2024

Wakil PM (Perdana Menteri) Tiongkok He Lifeng yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, bertemu dengan Ketua Pfizer Albert Bourla saat menghadiri Forum Pembangunan Tiongkok 2024 di Beijing, Tiongkok, Senin (25/3). Wakil PM Tiongkok He Lifeng menyambut perusahaan multinasional untuk memperluas investasinya di Tiongkok.

Resolusi PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza jadi Bentrokan Keras Israel dan AS

Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat memuncak setelah PM Netanyahu memutuskan membatalkan pertemuan yang dijadwalkan di Washington.

NEW YORK (IM) - Dewan Keamanan PBB hari Senin (25/3), telah mengeluarkan tuntutan pertamanya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Resolusi ini membuat murka Israel karena AS memilih abstain dalam pemungutan suara. Ketegangan dua negara yang awalnya saling mendukung ini pun tak terhindarkan.

Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat memuncak setelah PM Netanyahu memutuskan membatalkan pertemuan yang dijadwalkan di Washington oleh utusan utamanya untuk membahas strategi serangan di kota Gaza, Rafah. Langkah ini diambil menyusul keputusan Amerika Serikat yang memilih untuk tidak menggunakan hak veto dalam pemungutan suara Resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok.

Dalam sebuah pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel, keputusan AS tersebut dianggap merugikan upaya perang melawan Hamas dan merusak upaya pembebasan sandera. Netanyahu menyatakan keputusan AS tersebut adalah "mundur dari posisi konsisten AS dalam Dewan Keamanan sejak awal perang" dan memberikan sinyal kepada Hamas bahwa tekanan internasional dapat memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata tanpa memperoleh pembebasan sandera yang diinginkan.

Menanggapi pembatalan kunjungan tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyatakan kekecewaannya dan menekankan AS berharap untuk berdiskusi secara komprehensif dengan Israel tentang alternatif

tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi situasi di Rafah.

Kirby menegaskan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut tidak mencerminkan perubahan kebijakan, melainkan merupakan bagian dari dukungan AS terhadap gencatan senjata sebagai bagian dari upaya pembebasan sandera. Meskipun demikian, Israel menegaskan resolusi tersebut tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk melanjutkan operasi militer melawan Hamas.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Amerika Serikat "agak bingung" dengan keputusan Netanyahu, yang "memilih untuk menciptakan persepsi perbedaan di sini ketika mereka tidak perlu melakukannya itu." Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 anggota memberikan suara 14 setuju, 0 menolak dan satu abstain untuk menyetujui resolusi tersebut, yang juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel. Ruang tersebut pecah dengan tepuk tangan keras setelah pemungutan suara.

AS dalam sidang sebelumnya memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan sebagian besar karena gagalnya mengaitkannya secara langsung dengan pembebasan sandera, kegagalan mengutuk serangan Hamas, dan kerahasiaan dari negosiasi yang sedang berlangsung. Pejabat AS berpendapat gencatan senjata dan pembebasan sandera terkait, sementara Rusia, Tiongkok, dan banyak anggota dewan lainnya mendukung desakan adanya gen-

katan senjata tanpa syarat.

Resolusi yang disetujui hari Senin menuntut pembebasan sandera tetapi tidak menjadikannya sebagai syarat bagi gencatan senjata untuk bulan Ramadan, yang berakhir bulan April. Hamas mengatakan mereka menyambut baik langkah PBB tetapi mengatakan gencatan senjata perlu menjadi permanen. "Kami mengkonfirmasi kesiapan kami untuk terlibat dalam proses pertukaran tahanan segera yang mengarah pada pembebasan tahanan dari kedua belah pihak," kata kelompok itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres men-tweet: "Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan kami untuk terlibat dalam proses pertukaran tahanan segera yang mengarah pada pembebasan tahanan dari kedua belah pihak," kata kelompok itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres men-tweet: "Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan kami untuk terlibat dalam proses pertukaran tahanan segera yang mengarah pada pembebasan tahanan dari kedua belah pihak," kata kelompok itu.

Penumpang suara Dewan Keamanan terjadi setelah Rusia dan Tiongkok memveto resolusi yang disponsori AS hari Jumat yang akan mendukung "gencatan senjata segera dan berkelanjutan" dalam konflik Israel-Hamas. Karena Ramadan berakhir pada 9 April, permintaan gencatan senjata hanya akan berlangsung selama dua minggu, meskipun draf tersebut menyatakan jeda dalam pertempuran harus mengarah pada "gencatan senjata yang berkelanjutan".

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan resolusi tersebut "mengekalkan dukungan bagi upaya diplomasi yang sedang berlangsung," yang diminta AS diabaikan, termasuk kecemasan terhadap Hamas. Resolusi yang diajukan oleh 10 anggota dewan terpilih ini didukung oleh Rusia, Tiongkok dan Grup 22 negara Arab di PBB.

Di bawah Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum bagi 193 anggota negara, meskipun sering diabaikan. Duta Besar PBB dari Aljazair, Amar Bendjama, perwakilan Arab di dewan tersebut, berterima kasih kepada dewan atas akhirnya menuntut gencatan senjata.

"Kami menantikan komitmen dan kepatuhan dari kekuatan pendudukan Israel dengan resolusi ini, agar mereka mengakhiri pembantaian tanpa syarat apapun, untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina," katanya.

Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, mengatakan kepada dewan bahwa pemungutan suara tersebut "harus menjadi titik balik" yang mengarah pada penyelamatan nyawa di Gaza dan mengakhiri "serangan kekejaman terhadap rakyat kami." Tak lama sebelum pemungutan suara pada hari Senin, anggota-anggota terpilih mengubah draf resolusi akhir untuk menghilangkan kata "permanen" dari tuntutan bahwa gencatan senjata Ramadan harus mengarah pada "gencatan senjata yang berkelanjutan".

Rusia menolak penghapusan kata tersebut dapat memungkinkan Israel "melanjutkan operasi militernya di Gaza kapan saja" setelah Ramadan dan mengusulkan amandemen untuk mengembalikannya. Sejak awal perang, Dewan Keamanan telah mengadopsi dua resolusi tentang situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, tetapi tidak ada yang menyerukan gencatan senjata.

Selama invasi, lebih dari 32.000 warga Palestina dari Gaza tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Badan tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan anggota bersenjata dalam hitungannya, tetapi mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak menyumbang dua pertiga dari jumlah korban. • tom

sebuah kota di perbatasan Mesir di selatan Gaza di mana lebih dari 1 juta warga sipil Palestina mencari perlindungan dari perang.

Minggu lalu, Netanyahu menolakan permintaan AS untuk menghentikan rencana serbuan Rafah, lalu sesumbar selama kunjungan Menu AS Antony Blinken bahwa Israel akan bertindak sendiri jika perlu. Blinken memperingatkan bahwa Israel dapat segera menghadapi isolasi internasional yang meningkat, sementara Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan Israel dapat segera menghadapi konsekuensi yang tidak ditentukan jika meluncurkan serangan darat.

Perang suara Dewan Keamanan terjadi setelah Rusia dan Tiongkok memveto resolusi yang disponsori AS hari Jumat yang akan mendukung "gencatan senjata segera dan berkelanjutan" dalam konflik Israel-Hamas. Karena Ramadan berakhir pada 9 April, permintaan gencatan senjata hanya akan berlangsung selama dua minggu, meskipun draf tersebut menyatakan jeda dalam pertempuran harus mengarah pada "gencatan senjata yang berkelanjutan".

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan resolusi tersebut "mengekalkan dukungan bagi upaya diplomasi yang sedang berlangsung," yang diminta AS diabaikan, termasuk kecemasan terhadap Hamas. Resolusi yang diajukan oleh 10 anggota dewan terpilih ini didukung oleh Rusia, Tiongkok dan Grup 22 negara Arab di PBB.

Krisis Kesehatan, Asosiasi Dokter Korsel akan Pilih Pemimpin Baru

SEOUL (IM) - Asosiasi Medis Korea (KMA) yang mewakili sekitar 100 ribu dokter anggota komunitas akan memilih pemimpin baru pada Selasa, (26/3), yang dipastikan akan semakin meningkatkan ketegangan dengan pemerintah.

Pemilihan pemimpin baru asosiasi tersebut berjalan di tengah aksi mogok kerja berkepanjangan yang dilakukan oleh para dokter mengapa karena pemerintah menambah kuota pendaftaran sekolah kedokteran. Kedua kandidat ketua KMA adalah Ketua Asosiasi Pediatri Korea Lim Hyun-tack, dan Ketua Juru Bicara KMA Joo Soo-ho.

Sedangkan Joo menyatakan bahwa KMA tidak akan menerima peningkatan kuota pendaftaran dan tidak perlu melakukan pembicaraan dengan pemerintah. Sikap garis keras KMA berbeda dengan kelompok profesor kedokteran lainnya yakni Asosiasi Profesor Medis Korea yang berjanji untuk memainkan peran sebagai mediator antara komunitas dokter dan pemerintah di tengah kebuntuan tersebut.

Lebih dari 90 persen dari 13 ribu calon dokter di negara tersebut telah melakukan pemogokan dalam bentuk pengunduran diri massal sejak

20 Februari untuk memprotes keputusan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi dari saat ini 3.058 kursi.

Namun demikian, para profesor kedokteran yang merupakan dokter senior di rumah sakit universitas besar, kini juga mulai mengajukan pengunduran diri secara massal pada pekan ini, meskipun berjanji untuk tetap bekerja untuk sementara waktu. Pemerintah Korea Selatan berupaya meningkatkan kuota penerimaan pasien untuk mengatasi kekurangan dokter.

Khususnya di daerah pedesaan dan bidang medis penting seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, kebidanan, dan pengobatan darurat. Kendati demikian, para dokter berpendapat bahwa kenaikan kuota akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran serta menciptakan surplus dokter. Para dokter menyatakan, pemerintah harus memikirkan cara untuk lebih melindungi mereka dari tuntutan malpraktik dan memberikan kompensasi untuk mendorong lebih banyak dokter berpraktik di bidang yang dikategorikan tidak populer. • tom

Dituduh Korupsi, Mantan Menteri Transportasi Singapura Hadapi 35 Dakwaan

SINGAPURA (IM) -Mantan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran, yang didakwa melakukan korupsi, mendapat delapan dakwaan baru. Dia sekarang menghadapi total 35 dakwaan. Menurut Straits Times Singapura, Iswaran mengaku tidak bersalah atas dakwaan baru yang ditetapkan berdasarkan Pasal 165 KUHP yang menyatakan bahwa pegawai negeri menerima hadiah dari seseorang yang terlibat dengan mereka dalam kapasitas resmi merupakan suatu pelanggaran.

Iswaran didakwa menerima barang senilai SGD18.956,94, antara lain botol wiski, tongkat golf, dan sepeda Brompton antara November 2021 hingga November 2022.

Dia diduga menerima barang tersebut dari direktur pelaksana Lum Chang Building Contractors, sebuah perusahaan yang menerima kontrak dari Otomotif Transportasi Darat untuk pekerjaan penambahan dan perubahan Stasiun MRT Tanah Merah dan jembatan yang ada. Cabang konstruksi perusahaan tersebut, menurut laporan tersebut, telah melaksanakan proyek bernilai miliaran dolar di Singapura.

Sebelumnya, Iswaran menghadapi 27 dakwaan termasuk dua dakwaan korupsi.

Tuduhan tersebut terkait dengan dugaan suap yang diterimanya dari miliarder Ong Beng Seng sebagai bujukan untuk memajukan kepentingan taipan tersebut dalam perjanjian terkait Grand Prix Singapura.

Suap ini termasuk tiket GP Singapura, pertandingan sepak bola, dan pertunjukan musik senilai lebih dari SGD200.000 antara November 2015 hingga Desember 2021. Iswaran, yang diangkat menjadi menteri penuh pada 2011, mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari lalu. Ia juga mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen dan Partai Aksi Rakyat. • ans



HARI KEMERDEKAAN YUNANI

Tank mengikuti parade militer memperingati Hari Kemerdekaan Yunani, di Athena, Yunani, Senin (25/3). Yunani memperingati 203 tahun Hari Kemerdekaannya.

Donald Trump Berupaya Memperlambat Proses Hukum

WASHINGTON (IM) -Dihadapkan dengan total 88 tuduhan kejahatan dalam empat kasus federal dan negara bagian terpisah, Donald Trump menggunakan taktik sederhana yang selalu berhasil baginya di masa lalu, menunda waktu. Kandidat presiden Republik berusia 77 tahun tersebut telah menyiapkan pasukan pengacara berbayar tinggi di New York, Washington, Georgia, dan Florida untuk menunda tanggal sidangnya.

Tujuannya jelas, menunda tindakan pengadilan hingga setelah pemilihan November, ketika, jika dia berhasil merebut kembali jabatan presiden, dia berpotensi dapat meminta grasi kepada dirinya sendiri. Sejauh ini, strategi tersebut tampaknya berhasil.

"Ada kemungkinan dia dapat menghindari keadilan dengan menunda keadilan," kata Adam Schiff, anggota Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi anggota komite yang menyelidiki serangan 6 Januari di Capitol AS oleh pendukung Trump yang menolak menerima hasil pemilihan 2020. "Ini adalah taktik yang telah dicoba dan benar dari Trump sepanjang karirnya. Pengadilan tidak boleh terlibat dalam strategi itu," kata Schiff kepada CNN.

Andrew Weissmann, mantan jaksa federal dan penulis buku "The Trump Indictments" mengatakan taktik menunda tersebut bisa dimengerti. Sebagian besar terdakwa tidak ingin pergi ke pengadilan. Mereka mencoba menunda itu sebanyak mungkin," kata Weissmann kepada AFP.

Trump seharusnya menjalani sidang di Washington pada tanggal 4 Maret atas tuduhan berusaha untuk membalikkan hasil pemilihan 2020 yang dimenangkan oleh Demokrat Joe Biden, yang sekarang kemungkinan besar akan menjadi lawannya pada November.

Sidang itu ditunda hingga Mahkamah Agung memutuskan klaim Trump bahwa mantan presiden memiliki kekebalan dari penuntutan. Mahkamah tertinggi negara itu akan mendengarkan argumen dalam kasus kekebalan pada tanggal 25 April tetapi mungkin tidak mengeluarkan putusan hingga akhir Juni atau bahkan Juli. Weissmann mengatakan bahwa "tidak termaafkan" bahwa Mahkamah Agung telah menandatangani kasus tersebut di "jalur yang sangat lambat."

Di New York, Trump menghadapi tuduhan negara tentang pemalsuan catatan bisnis untuk membayar uang diam sebelum pemilihan 2016 kepada bintang porno dengan siapa dia diduga melakukan hubungan seks kembali pada tahun 2006.

Kasus itu seharusnya dimulai pada Senin, tetapi

Trump meminta penundaan hingga 90 hari setelah jaksa mengungkapkan bukti potensial belum diserahkan kepada pembelaan.

Hakim yang memimpin menolak argumen tersebut pada Senin dan memerintahkan sidang dimulai pada 15 April, menjadikannya satu-satunya kasus untuk saat ini dengan tanggal mulai tetap. Di Georgia, Trump dan 14 terdakwa lainnya menghadapi tuduhan mencari untuk membalikkan hasil pemilihan 2020 di negara bagian selatan.

Kasus Georgia itu telah terjebak selama berbulan-bulan oleh upaya Trump untuk menyingkirkan jaksa distrik karena hubungannya dengan pria yang dia sewa untuk menjadi jaksa penuntut utama.

Hakim dalam kasus itu akhirnya memutuskan pada tanggal 15 Maret bahwa jaksa distrik dapat tetap jika jaksa penuntut utama menggundurkan diri. Itu sekarang telah terjadi, tetapi tanggal sidang belum ditetapkan.

Kasus terakhir melibatkan pembunuhan dokumen-dokumen klasifikasi Trump setelah meninggalkan Gedung Putih dan sedang berlangsung di Florida di hadapan seorang hakim yang ditunjuk oleh mantan presiden itu sendiri.

Trump juga mengajukan klaim kekebalan di Florida, langkah yang jaksa gambarkan sebagai "begitu tidak beralasan sehingga sulit untuk memahaminya kecuali sebagai bagian dari upaya strategis untuk penundaan." Daniel Richman, seorang profesor hukum di Universitas Columbia, mengatakan pengacara Trump menggunakan "taktik penundaan normal."

"Ketika melibatkan mantan presiden, tak terhindarkan, masalah-masalah akan menjadi tidak terduga. Siapa pun yang berpikir pengacara Trump adalah para jenius ajaib, saya pikir itu salah," kata Richman.

Dalam mencari penundaan, pengacara Trump telah menuntut pemilihan yang akan datang dan aturan tak tertulis bahwa kasus tidak boleh dibawa dalam waktu 60 hari sebelum pemungutan suara.

Jaksa bersikeras aturan tersebut hanya berlaku untuk pengajuan tuduhan baru dan bukan penyelenggaraan sidang yang sedang berlangsung. Schiff mengatakan Departemen Kehakiman mungkin telah membuat tindakan memperlambat secara tidak perlu dalam membawa tuduhan terhadap mantan presiden.

"Penundaan itu telah berkontribusi pada situasi di mana tidak ada dari sidang-sidang ini mungkin akan dilanjutkan, meskipun masih harapan dan keyakinan saya bahwa setidaknya satu atau dua dari mereka mungkin akan dilanjutkan sebelum pemilihan," katanya. • ans

Remaja di AS Tembak Diri Sendiri di Kantor Polisi

CALIFORNIA (IM) -Seorang remaja perempuan menembak dirinya sendiri hingga tewas dengan pistol milik anggota polisi di lobi kantor polisi di California, Amerika Serikat. Remaja itu tiba-tiba masuk ke kantor polisi dan mengambil pistol dari tangan salah satu anggota.

Dilansir AFP, Selasa (26/3), remaja perempuan yang tidak disebutkan namanya itu awalnya menggedor pintu pada Minggu (24/3) malam. Saat petugas hendak membuka pintu, gadis itu berhasil mengambil senjata dinas dari salah satu dari mereka.

"Remaja itu menyerbu ke lobi dan meraih senjata api yang disarungkan sang deputy dan mengambilnya," kata anggota Kepolisian Los Angeles County.

"Terjadi pertikaian antara para anggota dan remaja yang dipersenjatai dengan senjata api," kata rilis tersebut.

Polisi mengatakan remaja itu tewas akibat luka tembak yang dilakukannya sendiri. Korban dinyatakan meninggal di tempat kejadian oleh petugas medis yang datang.

"Remaja tersebut menderita luka tembak yang dilakukan sendiri," katanya.

Terkait kasus ini, detektif

bagian pembunuhan sedang menyelidiki insiden tersebut, yang menurut para pejabat dimulai dengan telepon dari orang tua angkatnya yang melaporkan bahwa anak tersebut menderita krisis kesehatan mental. "Tujuan remaja tersebut tidak diketahui pada saat panggilan telepon dilakukan," katanya.

Departemen kepolisian daerah LA County mengatakan kematian itu "bukanlah insiden penembakan yang melibatkan Deputy," menggunakan terminologi yang digunakan ketika seorang petugas menembak seseorang.

Kejadian kekerasan antara polisi dan anggota masyarakat bukanlah hal yang jarang terjadi di negara ini. Laporan surat kabar Washington Post menunjukkan lebih dari 1.100 orang telah ditembak mati oleh polisi di seluruh negeri dalam 12 bulan terakhir.

Angka tersebut tidak resmi karena departemen kepolisian tidak diharuskan melaporkan insiden kepada pemerintah federal. Senjata api merenggut puluhan ribu nyawa setiap tahunnya di Amerika Serikat, sebuah negara dimana jumlah senjata api lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. • tom